



LAPORAN DELEGASI DPR RI

296TH EXECUTIVE COMMITTEE MEETING OF THE IPU

28 Juni - 1 Juli 2025, Athena - Yunani



**THE HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



RAPAT KOMITE EKSEKUTIF IPU
28 JUNI-5 JULI 2025 (ATHENA, YUNANI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inter-Parliamentary Union (IPU) merupakan organisasi parlemen global yang beranggotakan 180 parlemen negara. Forum tertinggi IPU adalah IPU General Assembly atau Sidang Umum IPU.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera yang juga merupakan Anggota Komite Eksekutif IPU (wakil dari Asia Pacific Group/APG) mendapat undangan langsung dari IPU untuk menghadiri rapat Komite Eksekutif IPU yang ke-296 pada tanggal 28 Juni 2025 di Athena, Yunani. Rapat tersebut akan dipimpin oleh Presiden IPU, Dr. Tulia Ackson.

B. Partisipasi DPR RI pada Sidang-Sidang Parlemen Dunia

Kehadiran dan partisipasi DPR RI rapat komite eksekutif IPU, merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang yang mengatur terkait diplomasi parlemen, termasuk Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang diantara lainnya untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI, yaitu pengawasan, penganggaran, legislasi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam

melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR RI diberi mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPR RI Tahun 2020, tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen.

BKSAP merupakan focal point diplomasi parlemen DPR RI dalam berbagai forum internasional termasuk Sidang Umum IPU. BKSAP DPR RI telah secara rutin mengirimkan delegasi di Sidang Umum IPU yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Pada Sidang Umum IPU ke-148 kali ini, DPR RI selalu berprinsip untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjalankan misi untuk turut serta membahas berbagai tantangan dunia termasuk perdamaian seperti mandat UUD 1945. Selain itu, keikutsertaan DPR RI dalam sidang tersebut juga bagian dari upaya untuk memelihara hubungan bilateral dan multilateral dengan parlemen Anggota IPU dan berbagai organisasi internasional yang hadir.

C. Tujuan dan Urgensi Kegiatan

- 1.** Berpartisipasi aktif dalam forum parlemen dunia (IPU) sesuai mandat diplomasi parlemen;
- 2.** Penguatan peran diplomasi parlemen Indonesia di forum internasional;
- 3.** Mengembangkan strategi bersama untuk implementasi resolusi-resolusi yang telah diadopsi, dan memecahkan tantangan global.
- 4.** Memperoleh gambaran strategis untuk mengukur hambatan dan peluang.

D. Visi Misi

Adapun misi delegasi BKSAP DPR RI menghadiri agenda tersebut adalah:

1. Berkontribusi aktif untuk menyoroti langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan parlemen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan tata kelola pemerintah.
2. Memperkuat peran parlemen dalam fungsi pengawasan dan keterwakilan atas tindakan pemerintah serta pertukaran praktik legislatif terbaik mengenai pembangunan berkelanjutan dari parlemen di seluruh dunia.

E. Susunan Delegasi

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. Mardani Ali Sera	F. P-PKS	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi

F. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke rapat komite eksekutif IPU berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/KU.05.05/KSOI/ST/6/2025/2025

G. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri rapat komite eksekutif IPU ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.

II. Lapoaran Kegiatan

A. Agenda

Agenda Rapat ke-296 Komite Eksekutif IPU

WAKTU	AGENDA
Saturday, 28 June, 2025	
Arrival of delegates	
15:00	Gather at Athens International Airport Eleftherios Venizelos Airport (ATH). Depending on arrival times, group transfers will be arranged – exact meeting point to be confirmed. Direct transfer to Olympia and the hotel Aldemar Olympian Village (Estimated arrival 19:00 – travel time about 3.5 hours)
21:30	Welcome reception and light dinner at the hotel (Aldemar Olympian Village)
Sunday, 29 June, 2025	
09:30-12:30	Meeting of the Executive Committee
12:30-14:00	Lunch
14:00-17:00	Continuation of the meeting of the Executive Committee
21:00-23:00	Gala Dinner
Monday, 30 June 2025	
09:30	Departure from the hotel
10:00-11:00	Guided tour of Museum of Ancient Olympia
11:00-13:00	Celebrations to mark the International Day of Parliamentarism and the 136th anniversary of the IPU <i>Venue: International Olympic Academy in Olympia</i>
13:00	Lunch: <i>Venue to be confirmed</i>
20:30	Dinner: <i>Venue to be confirmed</i>
Tuesday, 1 July 2025	
09:30	Departure for the Hellenic Parliament in Athens
13:00	Arrival at the Hellenic Parliament
13:30	Meeting with the President of Parliament, Mr. Nikitas Kaklamanis, and the members of the national IPU delegation

	Guided tour of the Parliament
14:30	Official lunch hosted by the President of the Parliament (<i>Venue to be confirmed</i>)
16:00	Departure of delegates for the Athens International Airport (Eleftherios Venizelos)

B. Jalannya pertemuan

Pertemuan Komite Eksekutif IPU ke-296 berlangsung di Olympia pada Minggu, 29 Juni 2025 di Aldemar Olympian Village Resort, Yunani. Pertemuan tersebut diikuti anggota Komite Eksekutif IPU sebagai berikut:

1.	Hon. Ms. Gabriela Morawska Stanecka (Polandia) – Vice President of the Executive Committee;
2.	Hon. Ms. Sevil Mikayilova (Azerbaijan) – Vice President of the Executive Committee;
3.	H.E. Ms. Nelly Butete Kashumba Mutti (Zambia/Speaker of the House of Representatives) – Vice President of the Executive Committee (<i>online participation</i>);
4.	Hon. Ms. Dionysia-Theodora Avgerinopoulou (Yunani) – tuan rumah pertemuan;
5.	H.E. Mr. Milton Dick (Australia/Speaker of the House of Representatives);
6.	H.E. Mr. Godswill Obot Akpabio (Nigeria/President of the Senate);
7.	H.E. Dr. Hamda bint Hassan Al-Sulaiti (Qatar/Deputy Speaker Shura Council));
8.	H.E. Mr. Mr. Xavier Iacovelli (Prancis/Vice President of the Senate);
9.	Hon. Dr. Mardani Ali Sera (Indonesia);
10.	Hon. Mr. Abderrahmane Qanshouba (Aljazair);
11.	Hon. Ms. Nour Abu Ghoush (Yordania);
12.	Hon. Mr. Agustín Almodóbar Barceló (Spanyol).

Adapun berikut adalah rangkuman jalannya pertemuan Komite Eksekutif IPU ke-296 dan agenda dimaksud.

1. *Approval of the summary record of the third sitting of the 295th session of the Executive Committee on 3 and 4 April 2025;*

Agenda membahas ringkasan pertemuan sesi sebelumnya yang dihelat di sela-sela pelaksanaan IPU Assembly ke-150 di Uzbekistan, April 2025. Peserta menyepakati ringkasan pertemuan dimaksud.

2. *Matters arising*

Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong, menyampaikan beberapa hal yang muncul dari apa yang telah disimpulkan pada sesi Komite Eksekutif ke-295 dan konsekuensi dari kesepakatan yang sebelumnya diambil. Beberapa diantaranya yakni mengenai mekanisme IPU untuk situasi krisis, pembahasan status parlemen Venezuela, amendemen statuta IPU akan menjadi subyek pembahasan di agenda berikutnya.

3. *Overview of IPU mechanisms that deal with crisis situations*

Sekretaris Jenderal IPU, Martin Chungong menjelaskan beberapa hal terkait mekanisme di IPU yang berkaitan dengan penanganan situasi krisis.

IPU memiliki beberapa mekanisme dalam kerja-kerjanya di area pencegahan konflik, pembangunan perdamaian, mediasi, respon kemanusiaan dan pengembalian ke tertib konstitusi.

Diskusi ini muncul sebagai respon dari pertemuan sebelumnya yang mengkhawatirkan adanya peningkatan pembentukan komite, sub-komite untuk mengatasi isu-isu spesifik yang berpotensi tumpang tindih dengan alat kelengkapan yang sudah ada. Ada usulan untuk membahas mengenai perlunya jangka waktu kerja untuk komite yang bersifat ad-hoc, ataupun mengkaji ulang keberadaan mekanisme yang sudah ada di IPU.

Mekanisme *pertama* yakni **mekanisme politik**, yang fokus pada pernyataan, rekomendasi, hingga komitmen melalui resolusi-resolusi yang diadopsi IPU pada masing-masing komite, ataupun sarana emergency item. Tiga komite tetap IPU (Peace and International Security; Sustainable Development; Democracy and Human Rights) menghasilkan resolusi. Sementara Komite Tetap untuk Urusan PBB menghasilkan mosi.

Mekanisme *kedua* melalui **mekanisme kelembagaan**, yakni seperti upaya mediasi dan diplomasi melalui kepemimpinan IPU (Presiden IPU dan Sekjen); badan tertentu (*dedicated bodies*) yakni Komite Isu Timur Tengah, Grup Fasilitator untuk Siprus, Satuan Tugas IPU untuk resolusi damai perang di Ukraina; badan khusus (*specialized bodies*) seperti Komite IHL, Kelompok Saran Tingkat Tinggi untuk Mengatasi Terorisme dan Ekstrimis Keras, Kelompok Kerja untuk Sains dan Teknologi, Komite HAM Anggota Parlemen. Forum Anggota Parlemen Muda dan Forum Anggota Parlemen Perempuan juga memberi perspektif tambahan terhadap resolusi-resolusi yang dihasilkan.

Mekanisme selanjutnya adalah melalui **mekanisme programatik**, yang diwujudkan melalui kampanye peningkatan pemahaman, dukungan pelatihan dan teknis, dan pengembangan perangkat praktis.

Mekanisme programatik ini utamanya ditujukan untuk perlucutan senjata, rekonsiliasi dan pencegahan konflik, mengatasi terorisme dan mencegah ekstrimis garis keras, respon atas tantangan lintas sektor dalam perdamaian. Hal-hal yang mewujudkan dalam mekanisme ini seperti contoh legislasi, peta interaktif untuk legislasi isu terkait, jaringan parlemen global, pengawasan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa, dan lainnya.

Dalam diskusi, Delegasi Qatar menyatakan perlunya IPU melibatkan seluruh kelompok geopolitik dalam mekanisme krisis. Qatar juga menekankan negaranya memiliki pusat dialog antarkeyakinan, menurutnya hal tersebut dapat diberdayakan lebih lanjut.

Delegasi Yunani menekankan perlunya Komite Eksekutif untuk mendengarkan pakar-pakar dalam isu penyelesaian sengketa dan konflik. Ia mengusulkan IPU mendedikasikan dua hari diskusi untuk mendalami mekanisme-mekanisme yang ada dengan mendengar paparan para pakar. Ia juga menyarankan agar badan-badan IPU lainnya tidak hanya bertemu biasa saja saat IPU Assembly. Mereka dapat bekerja di luar waktu Assembly dan di luar pertemuan reguler. Delegasi Polandia setuju dengan usul Yunani.

Delegasi Zambia menyarankan agar IPU dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah ketegangan yang ada di dunia.

Delegasi Indonesia menekankan pentingnya pula untuk berkonsentrasi mengatasi akar masalah seiring dengan semakin meningkatnya titik konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia. konflik seperti Gaza dan Palestina, titik konflik di Timur Tengah maupun situasi rentan di kawasan Afrika, perlu dilihat dalam skema yang lebih luas dengan menangani permasalahan di hilir tidak hanya di hulu.

Beberapa indikator seperti Indeks Demokrasi yang diluncurkan oleh The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan penurunan kualitas demokrasi global hingga hanya 17% dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang sesuai jalur untuk tercapai pada 2030 dan adanya peningkatan konflik menunjukkan relasi signifikan dari situasi pembangunan dengan sikap bermusuhan. Ia mendorong agar IPU memiliki mekanisme yang jelas pula agar dapat mempercepat pencapaian SDGs.

Delegasi Azerbaijan mengusulkan perlunya IPU untuk bekerjasama lebih dalam dengan PBB untuk mengatasi akar masalah konflik. Delegasi Yordania sebagai perwakilan Parlemen Muda IPU mengusulkan agar masing-masing parlemen memiliki unit krisis internasional yang dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan IPU saat situasi krisis terjadi.

Delegasi Australia menyatakan struktur IPU yang ada saat ini dapat diperkuat dengan kehati-hatian dalam aspek penggunaan sumber daya.

Delegasi Qatar dalam pertemuan sesi siang menekankan perlunya IPU menyikapi situasi terakhir yang terjadi di Timur Tengah, terutama ketika Iran melakukan serangan ke Al-Ubeid, Qatar. Qatar menekankan organisasi antarparlemen lainnya telah mengeluarkan pernyataan, sementara IPU tidak bersikap.

Delegasi Aljazair menekankan pentingnya Komite Eksekutif mempertimbangkan perubahan statuta agar IPU dapat mengeluarkan

pernyataan segera dalam menyikapi situasi krisis. Sementara Delegasi Nigeria menekankan urgensi menyatakan sikap dan merekomendasikan langkah untuk misi lapangan yang dapat dilakukan oleh Komite Urusan Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal IPU menguraikan posisi lembaga yang harus hati-hati, mengingat situasi krisis telah mereda ditandai dengan gencatan senjata antara Iran dan Israel. IPU perlu untuk tidak gegabah dan malah membuka kotak pandora.

Delegasi Indonesia menyepakati untuk tidak gegabah. Kendati demikian menekankan pentingnya mekanisme di IPU untuk bersikap, seperti melalui *Leadership Statement*.

Sekjen IPU merekomendasikan agar Komite Eksekutif mencatat krisis di Timur Tengah dan merekomendasi Pimpinan IPU untuk menerbitkan *Leadership Statement* (Presiden dan Sekjen IPU), dengan catatan menunggu respon dari Presiden IPU, sekaligus merujuk situasi dimaksud ke Komite Urusan Timur Tengah. Rekomendasi tersebut disepakati oleh para anggota.

Sekjen IPU juga menyampaikan komitmennya agar IPU dapat semakin inklusif dalam proses kerja parlemen. Di sisi lain ia mengusulkan adanya *IPU Group of Eminent Personalities* yang terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh IPU seperti mantan Presiden IPU, anggota Komite Eksekutif dan lainnya. Dengan pertimbangan redundansi dan kerumitan struktur, usulan tersebut ditolak oleh anggota Komite Eksekutif.

4. *Situation of certain parliaments: Niger and Venezuela*

Agenda ini membahas situasi keanggotaan dua parlemen yakni Niger dan Venezuela dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Parlemen Nigeria

- Pascakudeta militer dipimpin oleh Jenderal Abdourahamane Tiani, Juli 2023, Parlemen dibubarkan. Kudeta yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum itu dikecam The Economic Community of West African States (ECOWAS).
- Junta mengumumkan masa transisi tiga tahun dan ditolak ECOWAS.
- Pada Agustus 2023, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Niger.

- Pada Agustus 2023, junta menyampaikan kepada IPU mengenai niatan negara tersebut untuk membentuk Dewan Konsultatif untuk Transisi (Consultative Council of the Transition/CCN) pada kuartal pertama 2024.
- Pada September 2023, Burkina Faso, Mali, dan Niger membentuk aliansi negara Sahel (Alliance of Sahel States Alliance des États du Sahel) atau AES untuk merespon risiko tindakan militer dari ECOWAS pascakudeta di Niger.
- AES mengumumkan pada Juli 2024 rencana pembentukan parlemen AES. Pada Januari 2025, negara anggota AES resmi mundur dari ECOWAS. AES juga memperkenalkan paspor bersama.
- Pada Februari 2025, junta mengumumkan akan membentuk kelembagaan transisi termasuk parlemen dengan masa transisi minimum lima tahun dan dapat diperpanjang.
- IPU pada April 2025 atas rekomendasi Komite Eksekutif dan disetujui Governing Council, keanggotaan Parlemen Niger ditangguhkan dengan justifikasi tidak adanya parlemen transisi sejauh ini.
- Pascasidang umum IPU ke-150, junta militer membentuk Council of the Refoundation (CCR) berdasarkan mandat dari Pasal 68 Piagam Refoundation Niger (konstitusi transisi). Pada 8 Mei 2025, Ketua CCR Mamoudou Harouna Djingarey ditetapkan oleh Jenderal Tiani. Ketua CCR telah bersurat ke IPU menginformasikan keanggotaan baru CCR dan meminta dukungan IPU terhadap keanggotaan baru tersebut.
- Parlemen Niger memiliki tunggakan iuran keanggotaan sejak 2021 senilai CHF 21.752 (sekira Rp 437 juta). Namun sesuai aturan keuangan IPU tunggakan tersebut dihapus karena keanggotaan Niger telah ditangguhkan.

Sekjen IPU menyatakan dengan situasi Niger dimaksud, Ketua CCR berharap keanggotaan mereka akan dapat diaktifkan kembali di IPU. Sekjen juga menginformasikan Ketua CCR, Mamoudou Harouna Djingarey, sudah bersiap untuk berdiskusi secara *online* saat itu juga dengan seluruh anggota Komite Eksekutif.

Dalam diskusi, Ketua CCR menginformasikan perkembangan CCR dan bagaimana mereka berupaya untuk mengisi keanggotaan seinklusif mungkin sekaligus mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Pascadiskusi, Delegasi Indonesia ingin mengetahui lebih lanjut apakah jalur komunikasi informasi yang diterima IPU hanya berasal dari CCR. Ia mengapresiasi keterlibatan konstruktif Sekretariat IPU di CCR Niger, tetapi juga menekankan pentingnya memiliki informasi dari sisi lain yang memungkinkan pengambilan keputusan dapat lebih komprehensif.

Usul tersebut direspon positif oleh Australia dengan penekanan pandangan serupa mengenai informasi yang lebih komprehensif. Delegasi Yordania menyampaikan aktivasi kembali Parlemen Niger ke IPU dapat dilakukan apabila IPU telah dapat mengetahui secara lebih dalam mengenai peta jalan lima tahun Niger dalam perkembangan demokrasi mereka ke depan dan rencana CCR menjadi parlemen yang representatif.

Delegasi Nigeria menyarankan Komite Eksekutif untuk mendukung masuknya Parlemen Niger kembali ke IPU.

Dalam isu tersebut, Sekjen IPU menyimpulkan tidak adanya pertentangan terkait rencana pengaktifan kembali Parlemen Niger sebagai anggota IPU, namun anggota Komite Eksekutif memerlukan waktu lebih lama untuk menelaah segala informasi terkait. Komite Eksekutif menyepakati pembahasan reaktivasi keanggotaan Parlemen Niger akan kembali dilakukan pada Oktober 2025.

Parlemen Venezuela

- Pembahasan situasi Parlemen Venezuela telah berlangsung beberapa kali seiring dengan rencana Venezuela mengadakan Pemilu pada Mei 2025.
- IPU sejak 2021 tidak mengakui Parlemen Venezuela baik yang dibentuk sejak 2015 (yang terpilih tapi tidak diakui Maduro), maupun Parlemen yang dibentuk pada 2021 (dan diboikot oleh oposisi).
- Pada Juli 2024, Presiden Maduro memenangkan Pemilu lagi dan dipertanyakan oleh oposisi serta dunia.
- Pada Januari 2025, Presiden Maduro mengambil sumpah jabatan untuk ketiga kalinya.

- Hasil Pemilu memenangkan koalisi partai presiden Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, dengan 256 dari 285 kursi parlemen. Oposisi melalui sepuluh koalisi lainnya memenangkan 29 kursi parlemen. Tokoh oposisi terkemuka dan salah satu kandidat presiden Henrique Capriles terpilih masuk ke parlemen.
- Pemilu juga terjadi di kawasan sengketa Venezuela dengan Guyana yakni di Guayana Esequiba, kendati telah dilarang oleh International Court of Justice (ICJ).
- Sejumlah insiden Pemilu terjadi seperti minimnya pemilih dan banyaknya anggota militer di tempat pemungutan suara, dan penangkapan 70 individu dengan tuduhan berbagai macam, menjelang Pemilu.
- Keputusan Komite Eksekutif IPU pada pertemuan IPU ke-150 adalah untuk mempertimbangkan status keanggotaan Parlemen Venezuela pascapelaksanaan Pemilu.
- Tagihan tunggakan Parlemen Venezuela mencapai CHF 736.700 (sekira Rp 14,7 miliar).

Dalam pembahasan situasi Parlemen Venezuela, Delegasi Spanyol menyarankan IPU untuk bertemu dengan Presiden sah Venezuela yang berada di pengasingan di Spanyol. Menurut Delegasi Spanyol, banyak terjadi pelanggaran Pemilu di Venezuela, termasuk ditolaknya pengamat Pemilu dari Spanyol.

Merespon pembahasan, Sekjen menyarankan agar Komite Eksekutif kembali memonitor situasi dan keterlibatan tanpa mereposisi status keanggotaan Parlemen Venezuela hingga Januari 2026 (waktu parlemen baru Venezuela bersidang kali pertama).

5. *Amendments to and implementation of the IPU Statutes and Rules*

IPU memiliki Kelompok Kerja untuk Amendemen Statuta dan Peraturan IPU yang dibentuk sejak Maret 2024. Hasil Kelompok Kerja yang telah mengkaji beragam usulan dari anggota IPU, grup geopolitik, hingga alat kelengkapan IPU lainnya, telah diramu menjadi dua usulan amendemen yang disepakati pada Oktober 2024 dan April 2025.

Beberapa amendemen yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- Gender – penguatan keseimbangan dan paritas gender. Masuknya aturan untuk paritas gender antara Presiden dan Wakil Presiden dari Komite Tetap.

- Partisipasi pemuda – Kategori usia parlemen muda di IPU turun dari 45 ke 40. Aturan terkait diakomodasinya perspektif anggota parlemen muda dalam resolusi.
- Keragaman – Aturan untuk keragaman anggota delegasi tercermin dalam informasi persidangan.
- Tata Kelola IPU – penguatan Dewan Pengarah Majelis IPU dan formalisasi pertemuan Ketua Grup Geopolitik, Presiden Komite Tetap, dan Presiden badan-badan IPU lainnya.
- Akuntabilitas – Terbentuknya Komite Etik dan Pengawasan. Peran Governing Council dalam mengadopsi dan mengawasi strategi IPU diperjelas.

Beberapa isu tambahan yang tengah dalam diskusi antara lain sebagai berikut:

- Pengklarifikasian pengamat non-voting. Usulan amendemen untuk 151st IPU Assembly sebagai berikut:

Article 4.2 of the Statutes

*When a Member Parliament of the IPU has ceased to function as such, the Executive Committee shall consider the situation and express an opinion to the Governing Council. The Governing Council shall take a decision on the suspension of the affiliation of that Member Parliament to the IPU. **If the Governing Council decides not to suspend the affiliation of the Member Parliament, it may exceptionally take a decision to allow a parliamentary entity to participate in the IPU as the country's legitimate interlocutor, in a non-voting observer capacity. In such a case, any arrears of contributions owed by that Member Parliament shall be written off and the assessment of future financial contributions shall be suspended until such time as a parliament is re-established in the country in accordance with Article 3.1.***

- Perubahan komposisi keanggotaan Komite HAM Anggota Parlemen (dari 10 ke 12 orang, adil berbasis grup geopolitik. Afrika dan Twelve Plus

mendapat jatah tiga orang, Asia Pasifik dan GRULAC mendapat jatah dua orang, Aran dan Eurasia masing-masing satu orang).

Pasal lanjutan (Rule 1.4):

The Committee as a whole should be gender-balanced and in principle comprise five six men and five six women. In any case, there shall be no fewer than four members of either sex.

- Perubahan mandat dan komposisi Komite Urusan Timur Tengah, yang berdasarkan resolusi IPU tentang the role of parliaments in advancing the two-State solution in Palestine (disepakati di IPU ke-150), memberi mandat agar Komite Urusan Timur Tengah menjadi Satuan Tugas Strategis tentang Timur Tengah (yang lebih fokus ke isu Palestina dan Israel). Komite Urusan Timur Tengah akan kembali mendiskusikan hal tersebut pada pertemuan di IPU ke-151.
- Usulan tambahan amendemen dari Biro Parlemen Perempuan terkait kuota perempuan dalam delegasi dan sanksi untuk delegasi yang tidak mematuhi ketentuan dimaksud.
- Dalam hal resolusi darurat (emergency item), beberapa hal ditekankan yakni terkait hal terkini dengan aksi darurat oleh komunitas internasional diperlukan. IPU akan menyusun panduan pengajuan rancangan resolusi darurat (emergency item).

Delegasi Qatar mengatakan perlunya pendalaman usulan amendemen lebih lanjut khususnya dalam hal kuota parlemen Perempuan dalam delegasi, karena bisa saja beberapa parlemen tidak dapat memenuhi komposisi keanggotaan dimaksud.

Sekretariat IPU mengungkapkan, usulan dari Biro Parlemen Perempuan hanya merupakan aspirasi seiring dengan meningkatnya pemahaman mengenai komposisi parlemen yang bisa saja belum sesuai dengan jumlah representasi perempuan yang diharapkan bila ada kuota Perempuan dalam delegasi IPU.

6. *IPU Code of Conduct and Anti-Harassment Policy*

Sekretaris Jenderal IPU menerangkan sesuai persetujuan para anggota, IPU telah memiliki Kebijakan Anti Pelecehan dan Tata Berperilaku. Kedua dokumen tersebut mengatur situasi bagi anggota IPU dan juga pemilik jabatan IPU. Sekjen dan pegawai IPU terikat Kode Berperilaku dari pegawai IPU. Kebijakan-kebijakan tersebut akan disampaikan pada sesi khusus pada IPU Assembly, Oktober mendatang.

7. *Sixth World Conference of Speakers of Parliament*

Sekjen IPU menyampaikan perkembangan terkini persiapan penyelenggaraan Sixth World Conference of Speakers of Parliament, 29-31 Juli di Jenewa, Swiss. Komite Persiapan akan bertemu pada 4 Juli untuk mengkaji masukan-masukan dari dokumen luaran (*outcome document*).

Dalam konferensi, Sekjen menerangkan ada sesi inovatif yang membuka ruang Ketua Parlemen bersua dengan entitas lain seperti organisasi masyarakat sipil internasional. IPU juga akan menghadirkan satu tokoh terkenal, aktor Hollywood Michael Douglas, yang berperan sebagai UN Messenger of Peace. Per 29 Juni 2025, jumlah peserta yang sudah konfirmasi hadir adalah 43 Ketua Parlemen dan Sekretariat memperkirakan jumlah akan bertambah dalam beberapa hari ke depan.

8. *IPU Strategy*

Sekretariat IPU menyampaikan mengenai rencana penyusunan panduan strategi lima tahunan 2027-2031. Sebagai informasi IPU telah memiliki panduan strategi lima tahunan yang akan rampung pada 2026 (2022-2026). Saat ini IPU tengah dalam proses menyusun strategi 2027-2031.

Metode yang dilakukan terbagi dalam dua tahap yakni tahap asesmen dan tahap pengembangan.

Strategi 2027-2031 ditargetkan disepakati Governing Council pada persidangan IPU Maret-April 2026.

Tahap asesmen akan dilakukan mulai Juli – Oktober 2025 dengan melihat kerangka kerja strategis saat ini. Proses akan mengkaji relevansi, efektivitas, koherensi, efisiensi dan indikasi awal dari dampak atas pelaksanaan strategi IPU.

Pengkajian akan meliputi beragam aspek kerja IPU yakni sisi politik, program, komunikasi, penguatan dan efektivitas kelembagaan.

Sementara tahap penyusunan strategi baru dimulai pada Oktober 2025 – Maret / April 2026.

9. *Future IPU meetings*

Sekretariat menyampaikan beberapa perubahan agenda kegiatan IPU ke depan. Secara prosedur, seluruh agenda kegiatan IPU perlu disepakati oleh Governing Council yang dihelat setiap IPU Assembly. Namun, beberapa hal mendesak yang terkait teknis penyelenggaraan ataupun tawaran tuan rumah untuk pertemuan dalam waktu singkat, tidak dapat menunggu Governing Council.

Sekjen IPU menyampaikan Parlemen Turkiye siap untuk menjadi tuan rumah IPU Assembly ke-152 di Istanbul pada 15-19 April 2026. Kendati demikian persiapan teknis untuk hal tersebut perlu dilakukan sejak saat ini, dengan demikian, Sekjen mengusulkan agar Komite Eksekutif dapat menyepakati dan memberi mandat Sekretariat IPU untuk menindaklanjuti proses persiapan dimaksud.

Selain itu, IPU juga akan terlibat dalam penyelenggaraan Forum for Parliamentarians at the 3rd UN Conference on the Landlocked Developing Countries (LLDCs) di Awaza, Turkmenistan, 5-8 Agustus 2025. Sekjen mengharapkan persetujuan Komite Eksekutif sebagai pengganti Governing Council dalam hal ini.

Kedua agenda tersebut disepakati Komite Eksekutif.

Delegasi Indonesia menyatakan perlunya Sekretariat IPU untuk melakukan pembaruan agenda secara cepat agar persetujuan Komite Eksekutif dapat dilakukan melalui berbagai medium. Delegasi Yunani mengusulkan IPU untuk menjajaki pertemuan parlemen di sela-sela UN Ocean Conference.

Di sisi lain, para anggota Komite Eksekutif mempertanyakan rencana penyelenggaraan Parliamentary Meeting at COP30 di Belem, Brazil, November mendatang yang menurut informasi terdengar akan berada berdekatan dengan jalur sungai Amazon. Proses menuju lokasi dan adanya rencana mendirikan tempat penginapan dengan mendatangkan kapal pesiar, hotel di kapal, hingga pembangunan masif di dekat sungai Amazon.

Delegasi Prancis menyatakan langkah tersebut terkesan bertentangan dengan semangat aksi iklim dari COP30. Para anggota Komite Eksekutif menyampaikan pandangan perlunya pendalaman terkait hal tersebut oleh Sekretariat IPU.

C. PERTEMUAN LAINNYA

1. Perayaan Hari Internasional Parlemen

Selain pertemuan Komite Eksekutif IPU, para Delegasi juga mengikuti agenda perayaan Hari Internasional Parlemen yang jatuh pada 30 Juni. Perayaan tersebut dilakukan pada Senin, 30 Juni 2025 di Markas Komite Olimpiade Internasional (International Olympics Committee/IOC) di Ancient Olympia, Yunani.

Lokasi tersebut dipilih sebagai simbol adanya multilateralisme, inklusivisme, dan diplomasi damai dalam olahraga, yang sejalan dengan peran-peran yang dilakukan diplomasi parlemen dan IPU. Tema utama perayaan tersebut adalah kesetaraan gender yang sejalan dengan kampanye IPU tahun 2025 tentang [Achieving gender equality, action by action](#) yang didesain untuk mengembangkan institusi yang sensitif gender. IPU juga merilis 10 aksi untuk kesetaraan gender yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan parlemen agar dapat sensitif gender.

2. Pertemuan dengan Antipollution V Group

Delegasi juga melakukan pertemuan singkat dengan perusahaan lingkungan asal Yunani Antipollution, yang fokus pada penanganan limbah pada Selasa, 1 Juli 2025. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbesar di Yunani dan kawasan mediteranian.

Anggota Parlemen Yunani, Hon. Dionysia menyampaikan perusahaan tersebut berkeinginan bertemu dengan otoritas Indonesia untuk menyatakan minatnya dalam bekerjasama terkait pengelolaan limbah berkelanjutan, utamanya, untuk kawasan pelabuhan. Sedianya ia akan bertemu di Paris pada UN Ocean Conference Juni 2025 dengan Delegasi Pemerintah Indonesia, namun, hal tersebut tertunda karena agenda personal.

Jajaran Pimpinan Antipollution dan V Group (induk perusahaan) menyampaikan informasi mengenai perusahaannya yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam pengelolaan limbah berkelanjutan di pelabuhan. Baru-baru ini Antipollution bekerjasama dengan Otoritas Kanal Suez (Suez Canal Authority/SCA), menyepakati pengelolaan berkelanjutan akan limbah padat dan cair dan membentuk perusahaan patungan baru ([antipollution egypt](#)) dengan nilai investasi hingga US\$ 150 juta. Perusahaan baru tersebut menyediakan layanan *Port Reception Facilities* (PRF) untuk pengumpulan limbah cair dan padat dari kapal yang melintas di terusan Suzes. Proses tersebut sejak awal diklaim zero carbon.

Antipollution berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai prospek kerja sama yang dapat dikembangkan terkait pengelolaan limbah terpadu dan berkelanjutan dalam kawasan pelabuhan maupun maritim berkelanjutan dengan pemangku kepentingan di Indonesia dalam area bisnis terkait utamanya di kawasan pelabuhan (baik kementerian maupun BUMN terkait). Profil perusahaan terkait terlampir.

III. **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

1. Diskusi dalam rapat Komite Eksekutif IPU berlangsung mendalam dan menyentuh aspek internal IPU;
2. Komite Eksekutif menyepakati adanya rencana untuk melibatkan pakar resolusi konflik dan isu perdamaian untuk menguji beragam mekanisme krisis yang dimiliki IPU, melanjutkan status pembahasan keanggotaan Parlemen Niger dan Venezuela seiring perkembangan domestik di masing-masing negara;
3. Komite Eksekutif juga menyepakati agar Sekretariat melanjutkan pembahasan teknis penyelenggaraan IPU ke-152 dengan Turkiye yang dijadwalkan berlangsung pada 15-19 April 2026 di Istanbul, Turkiye dan menyetujui secara darurat pelaksanaan Forum for Parliamentarians at the 3rd UN Conference on the Landlocked Developing Countries (LLDCs), 5-8 Agustus 2025.
4. Komite Eksekutif juga memberi mandat Sekretariat untuk menyatakan kekhawatiran emisi karbon berlebihan dalam penyelenggaraan pertemuan parlemen pada COP-30 apabila diselenggarakan di Belém, Brasil mengingat lokasi dekat dengan Sungai Amazon dan penginapan terbatas. Agenda pertemuan IPU ke depan terlampir.
5. Pertemuan Konferensi Ketua Parlemen ke-enam akan menghadirkan Michael Douglas, UN Messenger of Peace sekaligus aktor film Hollywood. Sesi inovatif berupa pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil juga akan berlangsung dalam konferensi itu.
6. IPU juga merilis 10 aksi untuk kesetaraan gender yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan parlemen agar dapat sensitif gender (dokumen terkait dapat ditemukan [di sini](#)) di sela-sela perayaan Hari Internasional Parlemen yang jatuh pada 30 Juni.
7. Perusahaan Lingkungan dari Yunani yang merupakan salah satu perusahaan terkenal dan terbesar di Yunani dan kawasan mediterania, Antipollution dari V Group memiliki minat untuk berbisnis di Indonesia dan mengharapkan dapat bertemu pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Laut dan BUMN Pelindo.

B. Saran

1. DPR RI melalui BKSAP untuk dapat tetap mempertahankan keanggotaan di Komite Eksekutif hingga mandat berakhir pada Oktober 2027.
2. BKSAP DPR RI untuk dapat mempersiapkan partisipasi aktif dan keterlibatan substantif dalam pertemuan-pertemuan IPU berikutnya sesuai jadwal yang telah tersedia.
3. DPR RI untuk dapat melakukan pendalaman mengenai dokumen 10 aksi untuk kesetaraan gender.
4. BKSAP DPR RI untuk dapat menjembatani komunikasi lanjutan antara perusahaan lingkungan Yunani dengan pemangku kepentingan yang terkait.

Ketua Delegasi

ttd

Dr. Mardani Ali Sera



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id